

Analisis Teori *Performance* dan *Positioning* dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender

A. V. S. Hubeis^(a) dan R. S. H. Mulyandari^(b)

^(a) Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8420252, Fax. 0251-8627797, ^(b) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

Abstrak

Formative and positioning theories are the critique of structuralism and critical theory. In the formative perspective and gender positioning, there is a consequence of the semiotic practices, as a sign of deviation patterns of adaptation and negotiation position of a subject. Participation of the performance of gender can be done through mimicry and subversion rhetoric and understanding the intersection of gender with race, class, sexuality, ethnicity, and nationality. According to formative theory, gender or sexuality oppression is more of an ideological oppression and representation. Formative and positioning theories describe the relationship between subjects, discourses, practices, and position. The development of post structuralism theory manifests a constellation of challenges and new methodologies and adapts into a feminist critique of structuralism with methodological theory and new horizons, especially Post-Structuralism Discourse Analysis (PDA), which is directed at the meso level and the conversation focused on understanding the structure of actions speaking (words and deeds) which is limited by reference to social forces. PDA and then developed into a Post-Structuralism Feminist Discourse Analysis (FPDA). Forms of participatory development communication perspective in the perspective of gender performance and positioning theory state that the concept of empowerment of women in development is more focused on the patterns of conversation, dialogue and dialectic process that includes grassroots forum for dialogue, a new function of participatory communications on media, knowledge sharing on an equal footing, and Development Support Communication Model (DSC).

Keywords: *Post structuralism, Formative and Positioning theories, development communications, gender, Post-Structuralism Discourse Analysis (PDA)*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tatanan praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para wanita. Oleh karena itu, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya (Megawangi 1999).

Terdapat dua kelompok besar dalam diskursus feminisme mengenai konsep kesetaraan gender dan keduanya saling bertolak belakang. Pertama adalah sekelompok feminis yang mengatakan bahwa konsep gender adalah konstruksi sosial, sehingga

perbedaan perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial. Kelompok feminis lainnya menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender. Kedua kelompok yang berbeda ini didasari oleh landasan teori dan ideologi yang berbeda, sehingga memberikan dasar analisis gender yang berbeda pula.

Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, serta pola hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang timpang. Dalam pelaksanaan analisis gender memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Berbagai paham dan teori telah mendasari pemahaman kita terhadap komunikasi gender. Namun demikian, dalam konteks pengembangannya untuk aplikasi komunikasi pembangunan, perlu dilakukan pemahaman secara terstruktur terhadap komunikasi gender sehingga konsep-konsepnya dapat dimanfaatkan secara tepat. Salah satu konsep dalam teori komunikasi gender adalah pandangan dari *Post-Structuralist* yang bersumber pada teori filosofi dan bahasa. Pandangan *Post-Structuralist* dari perspektif teori *Performance* dan *Positioning* termasuk dalam kelompok feminisme yang mengatakan bahwa konsep gender adalah konstruksi sosial, sehingga perbedaan-perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial khususnya dalam pembangunan atau pengembangan masyarakat.

1.2 Permasalahan

Komunikasi pembangunan dalam perspektif gender selama ini masih belum banyak dikembangkan dan dikaji secara mendalam, khususnya berdasarkan pandangan *Post-Structuralist* dari perspektif teori *performance* dan *positioning*. Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan kajian komunikasi pembangunan dalam perspektif gender ini adalah:

1. Bagaimana pandangan *post-structuralist* khususnya dari perspektif teori performativitas dan teori *positioning* dalam komunikasi gender?

2. Bagaimana aplikasi *Post-structuralist Discourse Analysis* dalam komunikasi gender?
3. Bagaimana aplikasi teori *performance* dan *positioning* dalam komunikasi pembangunan?

1.3 Tujuan

Penulisan makalah ini secara umum ditujukan untuk memahami konsep komunikasi gender melalui analisis teori *performance* dan *positioning* yang termasuk dalam pandangan *post-structuralist*. Secara khusus, tujuan makalah ini adalah:

1. Mereview pandangan *post-structuralist* khususnya dari perspektif teori performativitas dan teori *positioning* dalam komunikasi gender.
2. Memahami aplikasi *Post-structuralist Discourse Analysis* (PDA) dalam komunikasi gender.
3. Menganalisis aplikasi teori *performance* dan *positioning* dalam komunikasi pembangunan.

2. Metodologi

Tulisan hasil *review* terhadap teori *performance* dan *positioning* sebagai salah satu pandangan dari teori *Post-Structuralist* dalam komunikasi gender. Analisis dilakukan terhadap beberapa hasil penelitian, literatur, dan *text book* baik tercetak maupun elektronik (*online* melalui internet) dengan literatur utama adalah dari buku "*Gender Communication Theories & Analyses: from Silence to Performance*" buah karya dari Charlotte Krollokke dan Anne Scot Sorensen tahun 2006.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pandangan Post-Structuralist dalam Komunikasi Gender

Perspektif yang tidak dapat dipisahkan dalam stukturalis adalah

menonjolkan keadaan saling mempengaruhi dari subyek, bahasa, dan masyarakat, serta mengutamakan kelembagaan, kompleksitas, dan kemungkinan dalam pemanfaatan kekuasaan. *Post-structuralist* melambangkan sebuah perubahan ke arah performan sebagai sebuah wujud dari praktek komunikasi (Krolokke dan Anne 2006).

Ahli filsafat Michel Foucault, Jacques Lacan, dan Judith Butler telah menjadi sumber inspirasi untuk pengetahuan ilmiah di bidang komunikasi yang mengarah pada paradigma *post-structuralist*. Dua kata kunci yang diberikan oleh Foucault yaitu (a) merujuk pada sebuah proses subyektifikasi dan perwujudan secara simultan, di mana diskursus menjadi subyektif dan penting, serta (b) kebenaran dan sistem kekuasaan berhubungan secara kompleks sehingga kebenaran dan kekuasaan bukan struktur atau lembaga yang monolitik, tetapi lebih diberikan untuk penyebutan situasi strategi yang kompleks.

3.2 Analisis Teori Performativitas dan Positioning dalam Komunikasi Gender

Teori formativitas dan positioning adalah sebuah kritik terhadap strukturalisme dan teori kritis yang memiliki latar belakang yang beragam terkait dengan teori feminisme sebagai teori kategori sosial, identifikasi, dan agensi. Dasar teori yang mendasari teori formativitas dan positioning adalah teori aktivitas kemampuan berbicara dan khususnya dari teori performativitas Austin. Formativitas adalah sebuah kata kerja yang merupakan tindakan dalam suatu peristiwa berpidato, misalnya pengenalan tokoh, teriakan keras yang melambangkan semangat dalam berpidato, dan menyimpulkan suatu

kekuatan yang diwujudkan dari sebuah ritual khusus. Hal ini mendasari adanya pembentukan bahasa tubuh sebagai ritual sosial semacam “*girling*” (kewanita-wanitaan) sebagai produksi dari seorang gadis (Livia & Hall 1997). Charlotte Krolokke dan Anne Scot Sorensen (2006) menyampaikan premis dan perspektif teori *Performance* dan *Positioning* dalam komunikasi gender sebagai berikut:

1. Gender bukan hanya sekedar sebuah sumber dari identitas dan bahasa tetapi merupakan sebuah konsekuensi – sebuah tindakan yang dilakukan atau sebuah efek dari praktek-praktek semiotik.
2. Gender adalah sebuah pertanda performativitas dengan efek keganjilan, oleh apa yang kita sebut sebagai penyimpangan dari pola adaptasi dan negosiasi posisi suatu subyek.
3. Kita berperan serta dalam performan gender dengan sebuah retorika mimikri (peniruan) dan subversi.
4. Pengertian gender berinterseksi dengan pengertian ras, klas, seksualitas, etnisitas, dan nasionalitas.

Teori performativitas dikembangkan oleh Butler di awal tahun 90-an. Butler mengatakan bahwa tidak ada identitas gender di balik ekspresi gender. Identitas dibentuk secara performatif, diulang-ulang hingga tercapai “identitas yang asli” sebagaimana disampaikan dalam bukunya yang berjudul *Gender Trouble* (Salih 2002):

“Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance, of a natural sort of being.”

Gender tidak hanya sekedar sebuah proses, tetapi gender adalah sebuah tipe

proses tertentu dari seperangkat aktivitas yang diulang-ulang dalam batas-batas kerangka yang mengatur dalam tingkatan yang tinggi (“*a set of repeated acts within a highly regulatory frame*”).

Byrne (2000) menyatakan bahwa Butler dalam bukunya yang berjudul *Gender Trouble* berhubungan dengan penelitian bagaimana kategori gender dihasilkan oleh rejim diskursif dari pada sebagai kategori ontologi. Kategori dari laki-laki, perempuan, heteroseksual, homoseksual bukan merupakan karakteristik yang penting atau yang tidak dapat dipisahkan tetapi merupakan efek dari sebuah kekuatan formulasi yang spesifik. Butler perhatian terhadap cara dalam mana tubuh (*body*) secara diskursif terbentuk.

Identitas terbentuk secara performatif melalui berbagai ekspresi yang selama ini dianggap sebagai hasilnya. Bentuk seksualitas ini direproduksi dan dinaturalkan dengan imitasi yang berulang-ulang (*reiterative imitations*), yang beroperasi melalui devaluasi, stigmatisasi dan abnormalisasi praktek seksual lainnya karena statusnya yang selalu terancam. Butler selanjutnya menyatakan bahwa “Imitasi merupakan inti proyek heteroseksual dan binerisme gendernya, bahwa drag bukanlah imitasi sekunder yang mengasumsikan sebuah gender yang asli, melainkan heteroseksualitas yang hegemonik itu sendiri adalah upaya yang konstan dan berulang-ulang untuk menyerupai yang diidealkan. Bahwa imitasi ini harus diulang-ulang, diproduksi praktek-praktek yang mempatologikan dan sains yang menormalkan secara besar-besaran untuk menghasilkan dan membuktikan klaimnya tentang originalitas dan kelayakan, menegaskan bahwa performativitas heteroseksual yang sempurna itu selalu dalam ancaman dan tidak

pernah dapat dicapai, bahwa upayanya untuk menjadi idealisasinya tidak pernah bisa dicapai, dan ia selalu dihantui wilayah kemungkinan seksual yang harus dikeluarkan dari norma gender heteroseksual untuk menghasilkannya” (Salih 2002).

Bagi Butler, seks bukanlah “*a bodily given on which the construct of gender is artificially imposed*”, melainkan “*a cultural norm which governs the materialization of bodies*” (sebuah norma budaya yang mengatur materialisasi tubuh). Baginya seks adalah “konstruk ideal yang termaterialisasikan secara paksa melalui proses waktu. Seks bukan sekedar fakta sederhana atau kondisi tubuh yang statis melainkan adalah “*a regulatory ideal whose materialization is compelled*”, dan materialisasi ini berlangsung melalui praktek pendisiplinan yang sangat canggih dan laten.” Pengulangan ini menurutnya penting sebagai tanda bahwa materialisasi itu tidak pernah selesai dan tubuh tidak pernah secara 100% sesuai dengan norma yang mengharuskan adanya proses normalisasi tersebut (Conanedogawa 2008).

Butler menghadapi kritik dari konstruksionis sosial radikal dalam pengembangan pentingnya “*the body*” (tubuh). Butler selanjutnya menyarankan topik pemahaman persoalan dalam istilah permohonan (keinginan) dan tidak memiliki keputusan yang pasti dari pembahasan yang terkait dengan hubungan antara “tubuh, keinginan (hasrat), dan diskursus. Kritik lainnya adalah bahwa teori ini adalah bersifat dasar-individual dan tidak mempertimbangkan faktor lain, misalnya jangka waktu dalam mana performan terjadi, keterlibatan orang lain, dan bagaimana mereka melihat atau mempersepsikan apa yang mereka saksikan. Kritik terakhir adalah premis

pada anggapan bahwa gender tidak datang lebih dahulu atau lebih tepatnya terjadi setelah praktek (kebiasaan atau mengikuti tindakan orang lain) yang cepat terjadi dalam interaksi mikro.

3.3 Analisis Teori Positioning dalam Komunikasi Gender

Teori positioning dapat dikatakan sebagai pelekatan dalam teori diskursif Butler sebagai sifat dasar dari gender, yang melengkapi batas perbedaan dari posisi subyek untuk tinggal, sehingga dengan cara tersebut dapat mentransformasikan (mengubah bentuk) mereka. Meskipun demikian, hal ini juga muncul sebagai sebuah bagian dari teori antara teori diskursus dalam tradisi Faucauldian: kecenderungan terbaru dalam psikologi seperti “*psycho-socio-linguistics*” dan formulasi yang baru-baru ini terjadi, contohnya, teori “*speech act*” (kepurupuraan dalam berbicara/sandiwara) sebagaimana yang dinyatakan oleh Baxter (2002).

Menurut Davies & Harre (Krolokke & Anne 2006) dinyatakan bahwa teori positioning menggambarkan hubungan antara subyek, diskursus, praktek, dan posisi. Selanjutnya, kemungkinan pilihan berasal dari keberadaan berbagai diskursus dan (perbedaan yang diterima), boleh jadi juga pada posisi

konflik dalam hubungan, situasi, dan konteks yang berbeda.

Dalam pendekatan analisis *positioning*, Raggat (2007) membuat tiga perbedaan utama dalam sistem klasifikasi. Pertama, terdapat perbedaan yang didasarkan atas medium (perantara) atau mode ekspresi yang mengindikasikan posisi (contohnya diskursif, *embodied* – menjadikan bagian dari). Kedua, kita dapat mengidentifikasi konflik dinamis di dalam diri seseorang – posisi pribadi. Ketiga, dalam domain budaya, posisi sosial tetap dan menggolongkan secara individu, yang selalu menempatkan derajat seseorang pada kekuatan kewenangan untuk mengampuni (belas kasihan) dan pembagian di sekitar budaya. Bentuk klasifikasi posisi menjadi domain ekspresif, personal, dan sosial disajikan pada Tabel 1.

Dalam mode ekspresi (a), Raggatt (2007) menyatakan bahwa bentuk *positioning* terdiri atas narasi, ekspresif, dan *embodied*. Positioning tidak hanya berperan secara diskursif, tetapi juga memberikan tanda khusus sebagai performan dari aktor sosial dan juga memahatnya melalui kekuatan media dari *embodiment* (perwujudan) sebagaimana dinyatakan oleh Butler (1992).

Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender

Tabel 1.
Bentuk klasifikasi posisi dalam teori positioning (Raggatt 2007).

<i>(a) Mode ekspresi</i>	
Narratif/diskursif	Cerita diri sendiri, autobiografi, ucapan naratif
Performatif/ekspresif	Presentasi diri sendiri yang strategis, bermain peran, teater, komedi, upacara keagamaan secara pribadi
<i>Embodied</i> (menjadikan bagian dari/mewujudkan)	Komunikasi non verbal, pemaknaan dan pencitraan terhadap tubuh, kostum, <i>fashion</i> , <i>cross dressing</i> dan <i>trans gender</i>
<i>(b) Posisi pribadi: Konflik dinamis dalam diri orang tersebut</i>	
<i>Moral career</i> (Karir moral)	Kepribadian yang baik vs kepribadian yang buruk; hero vs penjahat
<i>Affect</i> (Pengaruh)	Menyenangkan diri sendiri vs menyedihkan diri sendiri
<i>Agency</i> (Lembaga)	Kontrol, kebebasan, generativitas (sifat dapat menghasilkan) dan stagnasi
<i>Communion</i> (Persamaan/persahabatan)	Kasih sayang dan pertengkaran; pengikatan dan perpecahan
<i>(c) Posisi sosial: Konstruksi sosial dan budaya</i>	
Konversasional/diskursif	Posisi dalam dialog
Peran institusional/ritual	Peran sosial mikro (keluarga, pekerjaan)
Posisi secara politik /hirarki	
Kekuasaan	Otoritas dan subordinasi
Kelas	Tinggi dan rendah
Etnisiti	Perbedaan ras dan budaya
Gender	Patriarchi: maskulinitas – feminitas

Harre dan rekan-rekannya (Harre & Moghaddam 2003) menyatakan bahwa teori positioning bersifat sosial, diskursif, dan dinamis. Identitas berubah-ubah dan maknanya tidak tetap, tetapi dapat dibagi dengan pihak lain dan dinegosiasikan di antara komunitas mereka sendiri. Masyarakat menegosiasikan makna posisi mereka sendiri dan orang lain secara strategis melalui sebuah pertukaran sosial. Posisi merupakan respon dinamis dan berubah untuk sebuah proses sosial dan sebuah sumber perangkat budaya, diskursif, dan simbolik yang terjadi (ada) sebelum subyek hidup. Posisi muncul dari peran kelembagaan, misalnya yang memaksakan melalui *stereotype* mikro dan sosial makro yang sedang berlaku, contohnya tentang peranan gender. Posisi sosial seringkali dihasilkan secara

implisit oleh kemurnian perbedaan kekuasaan dalam dikotomi sosial; contohnya perempuan dan laki-laki. Istilah majikan (laki-laki) didefinisikan sebagai kekurangan kepemilikan harta, yang dalam suatu istilah yang negatif memberikan pengaruh bahwa secara individu dan kelompok seringkali membuatnya menjadi pendiam atau tertekan oleh bentuk posisi sosial tersebut.

3.4 Post-Structuralist Discourse Analysis (PDA) dalam Komunikasi Gender

Perkembangan *post* strukturalisme juga memanifestasikan konstelasi teori dan metodologi baru yang menantang dan diadaptasikan oleh feminis ahli komunikasi. *Post* strukturalisme pertama kali mengeks-

presikannya dalam sebuah kritik strukturalisme dan selanjutnya melampauinya untuk menunjukkan teori dan horison metodologikal baru, khususnya terkait dengan *Post-Structuralist Discourse Analysis* (PDA).

PDA tidak dapat memiliki agenda emansipatori dalam kesadaran bahwa dukungan sebuah narasi yang indah yang menjadi diskursus dominan miliknya sendiri. PDA memiliki perhatian dalam kebebasan bermain dari kemampuan berbicara yang berkali-kali (*multiple*) dalam sebuah konteks diskursus, yang berarti bahwa percakapan tersebut diam (bungkam), minoritas atau kelompok yang tertindas yang perlu didengarkan. Mengikuti alasan Foucault (1980) Baxter (2002) menyarankan bahwa PDA diperlukan untuk dekonstruksi konteks diskursif di manapun diskursus dominan mencari sebuah “tekad untuk kebenaran” dan selanjutnya sebuah “tekad untuk kekuasaan”.

Kecenderungan lain dalam PDA berakar dari alasan hubungan antara diskursif psikologi dan psikolinguistik sebagai “*positioning analysis*” (analisis posisi). Selanjutnya Davies dan Harre berpendapat bahwa praktek diskursif menyediakan posisi subyek yang memasukkan konsepsi naskah pertunjukan dan lokasi. Asumsinya adalah dalam posisi tertentu, seseorang tidak dapat terhindarkan untuk melihat dan bertindak dari kedudukan yang baik di dunia terhadap posisi dan dalam terminologi konsep, alur cerita, metafor, dan image tertentu sebagai “naskah pertunjukan yang dapat diinterpretasikan”. Kemungkinan pilihan berakar dari eksistensi yang sering kali kontradiktif, praktek diskursif. *Positioning* diperagakan pada tingkatan diskursus yang berbeda; pada tingkatan mikro dari pembentukan tata bahasa dan kalimat, dan pada tingkatan meso dari percakapan, bercerita, dan hubungan

sosial; serta pada tingkatan makro terhadap skemata estetis, diskursif repertoar, idiom, dan sebagainya. Kerangka kerja PDA terutama diarahkan pada tingkatan meso dan difokuskan pada pemahaman percakapan sebagai “sebuah struktur tindakan berbicara”, sebagai perkataan dan perbuatan dari tipe yang dibatasi oleh referensinya terhadap kekuatan sosial mereka (Krolokke dan Anne 2006).

3.5 *Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis* (FPDA)

FPDA berasal dari sumber yang berbeda dan juga diasumsikan dengan aturan yang agak berbeda. FPDA diinspirasi dari teori *performance* dan *positioning* dari Butler dan Davis khususnya dan Judith Baxter merupakan satu dari pendukung utamanya. Berdasarkan garis besar inspirasi dalam sebuah metodologi singkat tersebut, Judith Baxter lebih menyukai terminologi PDA yang lebih luas. Baxter telah memperluas secara eksplisit pada FPDA sebagai variasi PDA didasarkan atas sebuah kritik terhadap analisis percakapan (*Conversation Analysis-CA*) dan *Critical Discourse Analysis* (CDA), juga lebih tepatnya sebuah pengembangan lebih lanjut dari analisis diskursus dari CA dan CDA ke PDA. Baxter juga melaksanakan dua studi utama yang dipresentasikan dalam bukunya yang berjudul *Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis* (FPDA): *From Theory to Practice* dan telah memperkenalkan metodologi dalam serangkaian buku “*Positioning Gender in Discourse: a Feminist Methodology*”. Kalau Davis memiliki latar belakang dalam psikologi diskursif dan analisis naratif, Baxter memiliki latar belakang dalam linguistik dan CA. Dalam beberapa hal tertentu, Davis

menjadi lebih rumit dalam pendekatan teoritisnya, tetapi Baxter jauh lebih ekplisit dalam garis besar metodologinya. Secara umum, Krolokke dan Anne (2006) mendefinisikan pendekatan FPDA untuk meneliti cara dalam mana pembicara menegosiasikan identitasnya, hubungan, dan posisinya di dunia sesuai dengan cara penempatan mereka yang berkali-kali dalam diskursus (pidato) yang berbeda.

Dasar perhatian pendekatan tersebut lebih banyak kesesuaiannya dengan teori *performance* maupun teori *positioning*. Namun demikian, Baxter (2002) telah menyumbangkan pendekatan post strukturalis sebuah prinsip pandangan yang dipinjam dari formalis Rusia Mikhail Bakhtin: *polyphony* dan *heteroglossia*. *Polyphony* dalam interpretasi Baxter menandakan perkembangan (*multiplying*) teknik metodologi dan proses kerja dengan persaingan interpretasi terhadap seni yang sama, dengan demikian menekankan proses tentang produk. *Heteroglossia* berarti memperkuat *polyphony* dengan memfokuskan pada partisipasi dan perspektif yang berbeda atau dengan penyajian analisis terhadap keterlibatan partisipasi mata dan kemudian mengolahnya lagi.

3.6 Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan

Kontruksi gender dalam diskursus komunikasi pembangunan

Pengetahuan ilmiah komunikasi pembangunan saat ini mulai mempelajari diskursus yang digunakan untuk membenarkan dan menjelaskan intervensi. Dalam usaha untuk mengekspos diskursus pembangunan, para ilmuwan memiliki artefak (penemuan)

diskursif yang berbeda, seperti kebijakan pembangunan dan lembaga pembangunan, teori pembangunan, dan dokumen proyek. Pendekatan semiotik memahami diskursus sosial dan kode budaya sebagai seperangkat koordinasi simbolik dengan mana sebuah komunitas membuat kesadaran umum. Kode budaya dan diskursus sosial menghasilkan usaha komunitas manusia untuk mengekstrak dunia dari ruangan yang tidak terbatas oleh superimposing sebuah kisi-kisi dari label realitas.

Pembangunan dapat dipelajari sebagai fenomena sosial yang sesuai dengan proses sejarah dan ditransformasikan menjadi sifat dasar dan bahasa yang dirampas. Pembangunan pertama muncul pada waktu era selesai perang dunia kedua ketika negara-negara kaya di dunia mengetahui kemiskinan massal di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Nama dan definisi menandakan pada predeterminasi realitas sosial tipe pertimbangan solusi yang sesuai. Oleh karena itu, sebagai “dunia ketiga” didefinisikan untuk istilah solusi pembangunan dalam terminologi modernitas, batasan disusun untuk mendeterminasikan solusi pembangunan dalam terminologi untuk menanggulangi kemiskinan, yang oleh Escobar (1995) dinyatakan bahwa kemiskinan menjadi konsep yang terorganisir dan obyek dari sebuah problematika baru. Dalam kasus beberapa problematika (Foucault 1986), dinyatakan bahwa kemiskinan membawa pada adanya diskursus dan praktek yang membentuk realitas yang dirujuk. Bahwa perlakuan esensial terhadap dunia ketiga adalah kemiskinan tersebut dan solusinya adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjadi jelas, penting, dan kebenaran universal

Program pembangunan yang dirancang dan diimplementasikan dalam konteks modernisasi ditujukan bagi laki-laki dan perempuan dunia ketiga yang kental dengan ciri-ciri muncul sebagai sebuah mode interpretasi realitas sosial yang dihasilkan oleh konstruksi simbol lokal gender, kelas, dan ras. Hasilnya adalah sebuah diskursus pembangunan yang membicarakan diskursus Barat tentang modernisasi dengan diskursus lokal terhadap ras, kelas, dan gender.

Pembangunan menjadi sebuah mitos. Diskursus sosial, simbol-simbol budaya, dan mitos tidak *innocent*. Label tersebut dibentuk untuk membuat kesadaran terhadap realita yang diorganisasikan menjadi sistem simbolik yang berfungsi di sekitar sepasang oposisi yang diakui dalam terminologi hirarki. Contohnya atas-bawah: “atas” secara kultural diakui sebagai yang lebih baik dan “bawah” sebagai yang kalah. Label tersebut menyaring hubungan kekuasaan yang sama dengan naturalisasi dan legitimasi jika hirarki mereka organik dan penting, serta bukan konstruksi kemanusiaan. Berdasarkan atas legitimasi simbolik, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang tetap tinggal dalam kehidupan nyata masyarakat sepanjang mereka tidak mempertanyakannya. Formula retorikal menempatkan diskursus pembangunan bukan sesuatu yang luar biasa. Pembangunan muncul sebagai sebuah mode interpretasi realitas sosial yang dihasilkan oleh subyek sejarah tertentu (laki-laki, perempuan, dan lembaga di negara kaya) ke arah berlawanan dari subyek sejarah lainnya (laki-laki dan perempuan miskin dunia ketiga). Dalam kesadaran ini, pembangunan tidak pernah membicarakan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang lain. Pembangunan merupakan sebuah diskursus historis dalam mana manusia

didefinisikan, dibentuk, diartikulasikan – dinamakan- oleh orang lain dalam lingkungan yang memiliki kekuasaan (Rodriguez 2001).

3.7 *Komunikasi pembangunan untuk Millenium Domestic Growth (MDGs): UNICEF's Global Overview dalam perspektif gender*

Perbaikan dan peningkatan kualitas SDM bersifat multi dimensi, baik pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja dan berusaha, maupun gizi dan kesehatan. Faktor-faktor ini juga yang harus dikembangkan untuk memperkuat gerakan *gender mainstreaming* dalam kebijakan pembangunan pertanian. Kesemuanya ini berkaitan erat dengan peran, tugas, dan fungsi serta kedudukan wanita dalam strategi pembangunan pertanian melalui upaya pemberdayaan wanita tani di perdesaan. Tingkat adopsi inovasi teknologi terhadap kaum wanita relatif rendah.

Menurut Sayogyo (Elizabeth 2007), perubahan peran dan status wanita umumnya disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan wilayah di lingkungannya. Perubahan masyarakat tersebut makin dipacu oleh pertumbuhan ekonomi, akibat beralihnya sistem perekonomian dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya masyarakatnya. Perkembangan ekonomi dan sosial menimbulkan desintegrasi pembagian kerja antar gender yang secara tradisional telah terbentuk sejak dulu. Pola kerja produktif yang baru antar ataupun lintas gender mengarah pada diskriminasi pembagian kerja antar pria-wanita. Selama masa transisi tersebut, bukan suatu keniscayaan bilamana berbagai fungsi produktif wanita tani akan tercabut, yang

berdampak pada perlambatan proses pertumbuhan pembangunan pertanian.

Perbedaan status/posisi setiap anggota rumah tangga merupakan pengkajian diferensiasi peranan, berdasarkan perbedaan umur, jenis kelamin, status perkawinan, status/posisi sosial ekonomi, generasi, ataupun kekuasaan. Perbedaan tersebut merupakan analisis struktural, yang sebagian besar disebabkan oleh alasan biologis dan sosial budaya lingkungan suatu rumah tangga. Teridentifikasi bahwa pada dasarnya wanita memiliki peranan ganda dalam rumah tangga. Peran ganda kaum wanita tersebut terimplikasi pada (1) peran kerja sebagai ibu rumah tangga (mencerminkan *feminine role*), meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang), dan (2) berperan sebagai pencari nafkah (tambahan ataupun utama).

Pada era globalisasi, peran transisi dan egalitarian diprediksi akan menimbulkan berbagai kondisi, yaitu (1) dengan potensi dan kemampuan sebagai indikator penentu, kejajegan penajaman peran pria dan wanita akan memudar sehingga tidak jelas lagi pembedanya, (2) wanita pekerja akan meningkat sedangkan pria pengangguranpun akan meningkat, (3) mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal suami-isteri, orangtua anak, sehingga keluarga menjadi tidak utuh (Hubeis 1995). Berbagai kemungkinan tersebut mengindikasikan wanita dan pria dapat berperan setara, sebagai pencari nafkah di berbagai bidang, kegiatan rumah tangga, dan dalam bersosialisasi di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada terjadinya kesetaraan peran antara wanita dan pria dalam pembangunan nasional.

Salah satu tulisan Elizabeth (2007) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan pertanian di masa lalu, bukan mustahil secara tidak sengaja telah mengabaikan peran kaum wanita tani tersebut. Keteledoran tersebut menyebabkan posisi kaum wanita makin terjepit dan terkungkung dalam dimensi keterbatasan. Secara internal, keterbatasan wanita tercermin pada lebih rendahnya pendidikan, keterampilan, rasa percaya akan kemampuan dan potensi diri. Secara eksternal, keterbatasan tersebut tercermin pada lebih rendahnya akses wanita menangkap berbagai peluang di luar rumah tangganya.

Analisis gender merupakan alat analisis konflik yang difokuskan pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Hubeis (1995) mengemukakan perlunya pendekatan GDP (Gender dalam Pembangunan) dan pendekatan WDP (Wanita dalam Pembangunan) dalam setiap program pembangunan. Pendekatan GDP mendesain program yang mengintegrasikan dan mengarus-utamakan (*mainstreamkan*) aspirasi, kebutuhan, dan minat gender, sehingga pengembangan perencanaan dan implementasi program lebih banyak mencakup kebutuhan strategis gender. Pendekatan WDP didesain untuk menjembatani kesenjangan pria wanita dalam semua aspek pembangunan. Muncul dan berkembangnya berbagai gerakan wanita dan disiplin tentang studi wanita, mempengaruhi perkembangan teoriteori feminis yang berkaitan erat dengan isu gender.

Dalam konsep Gender dan Pembangunan (GAP), gender dinyatakan oleh Butler sebagai *performance* dari seseorang yang tidak bebas. Kita selalu memainkan peran yang diatur secara sosial dan menginternalisasikan peranan tersebut pada

kita. Kita memainkan variasi peranan pada *performance* yang diatur atau memberlakukan kembali peranan yang sama dengan makna yang baru, pengulangan unit yang bertentangan, contohnya julukan keganjilan (*label queer*) tidak sebagai sebuah pencemaran, tetapi sebuah kebijakan (politik) baru.

Judith Butler (1992) menyatakan bahwa perubahan sosial maupun kebijakan pembangunan dalam penampakan identitas muncul ketika ada pergeseran dalam wacana-wacana dominan. Karya Judith Butler (1992) ini menjadi penting dalam kajian tentang ruang, terutama untuk menunjukkan bahwa tempat dan ruang bukanlah sesuatu yang sudah hadir sebelumnya di mana suatu kejadian atau penampakan muncul. Melainkan bahwa kejadian atau penampakan itu sendiri merupakan sesuatu yang membentuk atau me(re)produksi tempat dan ruang adalah efek dari persilangan kekuatan-kekuatan dominan. Dengan demikian, dikotomi antara privat dan publik tidak lagi relevan. Kalau dikotomi itu dulu memandang ruang itu homogen, artinya immobile dan statis, kini ruang tidak jelas lagi batas-batasnya. Baik ruang publik maupun ruang privat adalah heterogen dan tidak semua ruang jelas batas-batasnya antara yang privat dan publik. Dalam konteks inilah Jolly (2000) menyampaikan tentang proses bekerjanya kuasa dalam ruang (tanpa peduli apakah privat atau publik).

Konsep pembangunan yang memisahkan antara daerah perkantoran dan perumahan, menunjukkan terpisahnya wilayah kerja antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki berurusan dengan wilayah publik yang namanya kantor, sementara perempuan bekerja di rumah, di wilayah privat, yang dipisah jauh jaraknya dari kantor. Selain proses genderisasi ruang, kita juga mengenal proses rasialisasi dan

etnisasi ruang. Artinya ruang didefinisikan kembali dalam konteks nilai-nilai yang dilekatkan kepada masing-masing ruang (yang sudah dipilah-pilah) dan juga didekatkan ke batas-batas di antara kedua domain.

Gender mainstreaming (pengarusutamaan gender) bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat mempertimbangkan kesempatan dan akses wanita terhadap program pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi wanita. Dengan demikian, diperlukan pembinaan peran wanita agar mampu meningkatkan peran dan potensi, terutama produktivitasnya melalui pemberdayaan kaum wanita di segala bidang.

3.8 Pentingnya GPI (*Gender and Poverty Inclusive*)

Gender and poverty inclusive, atau inklusif gender dan kemiskinan, merupakan nilai atau roh yang diperjuangkan oleh berbagai lembaga yang memberi perhatian khusus pada gender, di antaranya adalah *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) dan menjadi pegangan di dalam melaksanakan program. Untuk itu ACCESS mencoba mengembangkan *policy*, strategi dan teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mendorong agar nilai GPI bisa diterapkan dan mewarnai semua aktivitas, dengan menggunakan proses-proses yang partisipatif (*CLAPP – Community Led Assessment Planning Process*).

Keberpihakan pada perempuan dan orang miskin dilatarbelakangi oleh kenyataan pada umumnya perempuan dan orang miskin memiliki posisi yang lebih rentan dibandingkan kelompok laki-laki maupun kelompok yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang lebih kuat. Sebagian besar

perempuan mengalami subordinasi dan marginalisasi yang menyebabkan posisi perempuan di masyarakat tidak cukup kuat. Meskipun bentuk dan tingkat subordinasi perempuan berbeda-beda yang bergantung pada budaya dan juga wilayah, namun bisa ditemukan adanya beberapa kesamaan. Perempuan miskin juga lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita daripada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. Kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk, sulitnya persediaan air bersih, adalah beberapa kondisi umum yang dihadapi oleh orang miskin. Kondisi seperti ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup. Selain itu, orang miskin biasanya juga berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf, yang tentu saja membatasi aksesnya terhadap informasi.

Birdshal dan McGreevey (1983) menemukan fakta bahwa beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda mereka – sebagai orang yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Perempuan bertanggungjawab untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan rumah tangga, yang menyerap sebagian besar waktu mereka. Namun, pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai “pekerjaan”, sehingga juga tidak diperhitungkan dalam “produksi” sebuah rumah tangga. Hal ini diperburuk lagi dengan adanya anggapan bahwa penghasilan

perempuan hanya sebagai “tambahan” penghasilan suami.

3.9 Isu Kesetaraan Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Selama ini, perempuan memiliki akses yang secara sistematis rendah terhadap berbagai sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya pendidikan, tanah, informasi dan keuangan. Di sebagian besar negara berkembang, perusahaan yang dijalankan oleh perempuan cenderung kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi penyuluhan dan kredit, dibandingkan perusahaan yang dikelola laki-laki. Ketidaksetaraan ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif lainnya, mengurangi kemampuan perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya. Hal ini juga memperbesar resiko dan kerentanan perempuan dalam menghadapi krisis pribadi maupun keluarga, dalam masa tua maupun ketika terjadi krisis ekonomi (Laporan Penelitian Bank Dunia 2002).

Ketidaksetaraan gender dalam akses kontrol atas modal (*asset*) produktif seperti tanah, informasi, teknologi dan modal keuangan membatasi perempuan untuk berperan serta dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pembangunan. Tidak ada data berdasarkan gender dari berbagai negara mengenai akses-akses ke sumberdaya produktif. Namun kenyataannya telah terdokumentasi secara luas bahwa

perempuan pada umumnya memiliki lebih sedikit modal ketimbang laki-laki dan memiliki akses yang lebih buruk terhadap kredit, pasokan lain, serta terhadap layanan penyuluhan.

Di bidang pertanian misalnya, petani wanita juga hanya memiliki sedikit jaringan kerja dan jaringan sosial yang dapat mempermudah akses terhadap pelayanan kredit. Petani perempuan umumnya juga menerima lebih sedikit bantuan teknis dan layanan penyuluhan pertanian. Perempuan lebih sedikit memiliki akses terhadap layanan penyuluhan karena selain pendidikan mereka kurang, tanah yang dikuasai juga kecil, dan karena penyuluh yang sebagian besar laki-laki, cenderung memberikan layanan bagi pertanian yang ada laki-lakinya. Staf penyuluhan juga sebagian besar laki-laki, perempuan juga masih sedikit yang berkonsultasi pada petugas layanan penyuluhan. Hal ini diperburuk dengan kecenderungan adanya batasan-batasan budaya yang menentang agen penyuluhan untuk bekerja sama dengan petani wanita karena petani pria bertanggungjawab atas tanaman perdagangan yang seringkali lebih mendapat perhatian dari dinas penyuluhan daripada tanaman pangan. Dalam berbagai latar belakang budaya, wanita tidak boleh mengutarakan pendapat dalam sebuah pertemuan kecuali bila diminta. Batasan ini mengandung arti bahwa petani wanita memiliki jendela wawasan lebih sempit untuk melihat dunia luar dibandingkan pria. Karena itu, wanita tidak banyak tahu tentang permasalahan yang sesungguhnya dapat dimintakan bantuan dari agen penyuluhan.

Petani perempuan cenderung mempunyai akses lebih buruk ke sumberdaya penunjang produksi pertanian, baik terhadap informasi produksi, pelatihan maupun teknologi dari berbagai lembaga penyuluhan. Hal

ini berdampak lebih signifikan pada pemahaman relatif perempuan terhadap informasi bidang pertanian. Petugas penyuluh yang sebagian besar adalah laki-laki menyebabkan layanan penyuluhan juga terbiasa mengutamakan petani laki-laki karena petani laki-laki dianggap sebagai pengambil keputusan utama urusan pertanian dan akan meneruskan hasil penyuluhan yang diperolehnya tersebut kepada istrinya. Tidak satupun asumsi bahwa proses pengambil keputusan bidang usaha pertanian dikendalikan oleh petani laki-laki ini didukung oleh data akurat. Pada kenyataannya, perempuan adalah pengelola lahan di banyak negara dan telah berlangsung sejak dulu di Sub-Sahara Afrika. Sedangkan di kawasan lain laki-laki yang meninggalkan pekerjaan bertani ke pekerjaan non pertanian semakin meningkat. Seperti sumberdaya rumahtangga lainnya, informasi penyuluhan antar warga rumah pun seringkali tidak dipersatukan.

Dalam pengelolaan usahatani, terdapat pembagian kerja untuk tugas-tugas tertentu antara pria dan wanita, dan umumnya peranan pengambilan keputusan dilakukan oleh pria. Pria dan wanita memiliki usaha yang terpisah, misalnya pria lebih banyak menguasai pengelolaan tanaman perdagangan, dan wanita pada ternak kecil. Banyak pekerjaan di pertanian yang diserahkan kepada wanita saat kaum pria pergi ke kota untuk bekerja (Van den Ban & Hawkins 2007). Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila wanita diposisikan sebagai subyek langsung dalam proses pembangunan.

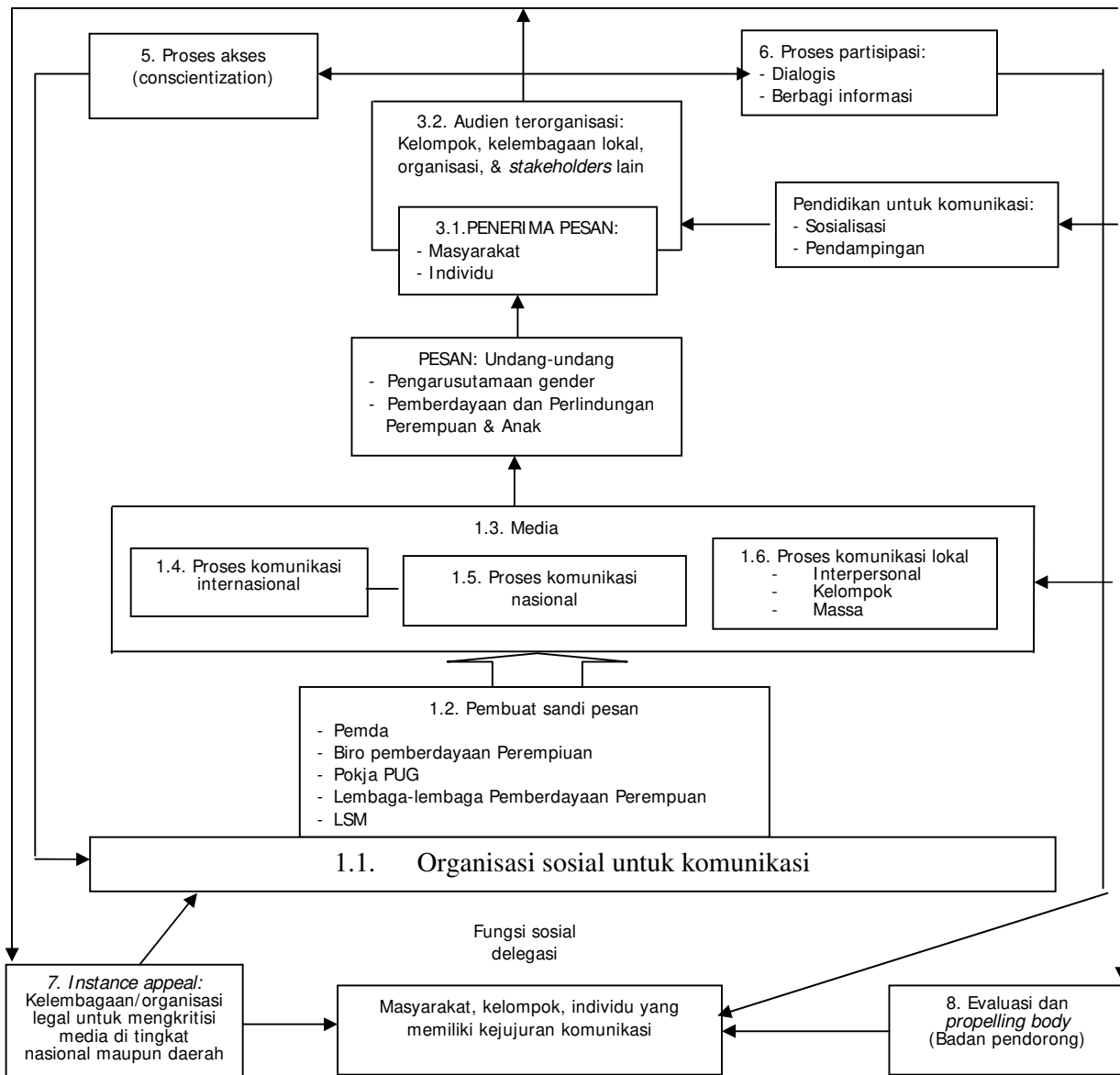
Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender

3.10 Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender berdasarkan Teori Post-Structuralist (Performance dan Positioning)

Jan Servaes mengaitkan konsep pemberdayaan pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kolektif. Pemberdayaan meyakinkan bahwa perempuan mampu membantu dirinya sendiri. Dalam teori positioning (Raggatt 2007), pemberdayaan lebih diarahkan pada "conversational" yaitu proses dialog dan dialektika. Melkote (2001) dalam bukunya yang berjudul *Communication for Development in the Third World*, salah satu yang sangat luas digunakan saat ini adalah pemberdayaan sebagai pusat pengorganisasian konsep. Melkote setuju bahwa ketidakadilan kekuasaan sebagai permasalahan sentral yang harus dipecahkan dalam pembangunan. Selanjutnya pemberdayaan didefinisikan sebagai sebuah proses dalam mana masyarakat secara individual dan organisasional memperoleh pengawasan dan penguasaan kondisi sosial ekonomi yang lebih banyak, dengan partisipasi demokrasi

yang lebih baik dalam komunitas masyarakat sendiri.

Bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang partisipatif berwawasan gender dalam konsep pemberdayaan menurut Servaes (2002) mencakup forum dialog akar rumput (grassroots dialog forum), fungsi baru komunikasi pada media partisipatif (participatory media), berbagi pengetahuan secara setara (knowledge-sharing on a co-equal basis), dan model komunikator pendukung pembangunan (Development Support Communication). Dialog akar rumput didasarkan atas kaidah partisipasi untuk mempertemukan sumber dan agen perubahan langsung dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyadaran (conscientization) melalui dialog. Lebih jauh lagi masyarakat diajak untuk merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya sekaligus pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan permasalahan. Model komunikasi pembangunan berbasis gender dalam perspektif teori performatifitas dan positioning yang partisipatif dan diusulkan dalam akhir tulisan ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model komunikasi gender dalam proses pembangunan (dimodifikasi dari Servaes 2002)

Unsur dari model komunikasi gender dengan partisipasi aktif masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Servaes (2002) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1.1. Organisasi sosial untuk masyarakat: struktur koordinasi dan kebijakan administratif dalam fungsi media.
- 1.2. Media: seperangkat alat transmisi yang terorganisasi yang mendistribusikan pesan di bawah koordinasi 1.1.

hubungan timbal balik antara lembaga media nasional dan internasional yang menyediakan pesan yang sesuai dengan dasar hukum nasional dan internasional.

- 1.4. Proses komunikasi nasional: mekanisme dengan mana media dan receiver memperoleh panorama kritis terhadap realitas nasional dalam lingkup keterbatasan norma yang dibentuk secara nasional sendiri.

Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender

- 1.5. Proses komunikasi lokal: mekanisme dengan mana media lokal dan komunikasi interpersonal bercampur baur dan menyumbang pada proses pengambilan keputusan, identitas budaya, partisipasi, dan sebagainya.
2. Pesan: dinamakan "informasi" dari dan tentang kejadian-kejadian yang diterima, diproses, dan ditransmisikan pada informasi dasar untuk kejujuran sosial dan individu pada tingkat global dan sosial. Informasi harus memberikan keaslian atau kebenaran (bukan pernyataan yang salah/palsu), perlakuan analitis dari masyarakat.
- 3.1. *Receiver*: penerima pesan yang memperoleh pendidikan yang cukup dan menyeleksi secara kritis terhadap pesan. Pelatihan membantu mereka menjadi subyek yang aktif dalam proses komunikasi.
- 3.2. Audien yang terorganisasi: jumlah *receiver* secara keseluruhan. Mereka harus menyadari bukan sebagai individu, tidak terorganisasi, dan massa secara kuantitatif, namun lebih sebagai kelompok sosial atau lembaga yang berkaitan dalam sebuah bentuk organisasi atau struktur dengan masyarakat yang lebih luas, seperti kelompok buruh, kelompok budaya, partai politik, atau gerakan sosial yang baru.
4. Pendidikan untuk komunikasi: pemanfaatan sumber daya pendidikan dalam keseluruhan tingkatan masyarakat menjadi penerima yang memungkinkan untuk membentuk opini, menilai informasi, dan mengevaluasi peranan media sebagai transmitter yang secara sosial menginterpretasikan kejadian.
5. Proses akses. kejujuran *receiver* berpartisipasi dalam konsep-tualisasi dan proses komunikasi serta potensi kejujurannya menggunakan media untuk "conscientization" secara lebih jauh.
6. Proses partisipasi: mekanisme dengan mana masyarakat yang terorganisasi memungkinkan akses pada struktur di mana perencanaan internal dan pengambilan keputusan tentang suatu media dilaksanakan, sebaik untuk organisasi yang memberikan pendidikan untuk komunikasi.
7. *Instance of appeal*: organisasi legal yang dibangun mendukung kejujuran penerima untuk partisipasi informasi dan organisasi media secara kritis.
8. Evaluasi dan *propelling body*: sebuah mekanisme kelembagaan yang memiliki obyek penjaminan produksi komunikasi sebagai kejujuran sosial dan obligasi dan membantunya dalam proses implementasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti komputer dan teknologi komunikasi, khususnya internet dapat digunakan untuk menjembatani informasi dan pengetahuan yang tersebar di antara yang menguasai informasi dan yang tidak. Akses terhadap komunikasi digital membantu meningkatkan akses (baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan) terhadap peluang pendidikan, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan pemerintah, memperbesar partisipasi secara langsung dari "used-to-be-silent-public" (masyarakat yang tidak mampu berpendapat) dalam proses demokrasi, meningkatkan peluang perdagangan dan pemasaran, memperbesar pemberdayaan masyarakat dengan memberikan suara kepada kelompok yang semula tidak bersuara (perempuan) dan

kelompok yang mudah diserang, menciptakan jaringan dan peluang pendapatan untuk wanita, akses terhadap informasi pengobatan untuk masyarakat yang terisolasi dan meningkatkan peluang tenaga kerja (Servaes 2007).

4. Simpulan

Pandangan *post-structuralist* dari perspektif teori performativitas dalam komunikasi gender dinyatakan bahwa gender dan seksualitas menentukan batas-batas maskulinitas dan feminisme, menentukan norma-norma pergaulan antar gender yang berbeda-beda, dan pada gilirannya meneguhkan patriarki dan heteronormativitas. Ketertindasan gender atau seksualitas lebih dipahami sebagai ketertindasan secara ideologis dan representatif, daripada kondisi material penindasan itu sendiri. Materialitas ideologi dan materialitas di luar representasi dikesampingkan. Sedangkan dari perspektif teori *positioning* dalam komunikasi gender menggambarkan hubungan antara subyek, diskursus, praktek, dan posisi. Kemungkinan pilihan berasal dari keberadaan berbagai diskursus dan (perbedaan yang diterima) dan juga pada posisi konflik dalam hubungan, situasi, dan konteks yang berbeda.

Perkembangan post strukturalisme juga memanifestasikan konstelasi teori dan metodologi baru yang menantang dan diadaptasikan oleh feminis ahli komunikasi dalam sebuah kritik strukturalisme dengan teori dan horison metodologikal baru, khususnya terkait dengan *Post-Structuralist Discourse Analysis* (PDA). Kecenderungan dalam PDA adalah berakar dari alasan hubungan antara diskursif psikologi dan psikolinguistik sebagai "*positioning analysis*" (analisis posisi). Positioning diperagakan pada

tingkatan diskursus yang berbeda, pada tingkatan mikro dari pembentukan tata bahasa dan kalimat, dan pada tingkatan meso dari percakapan, bercerita, dan hubungan sosial; serta pada tingkatan makro terhadap skemata estetika, diskursif repertoar, dan idiom. Kerangka kerja PDA terutama diarahkan pada tingkatan meso dan difokuskan pada pemahaman percakapan sebagai "sebuah struktur tindakan berbicara", sebagai perkataan dan perbuatan dari tipe yang dibatasi oleh referensinya terhadap kekuatan sosial. PDA selanjutnya dikembangkan menjadi *Feminisme Post-Structuralist Discourse Analysis* (FPDA).

Bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang partisipatif berwawasan gender dalam konsep pemberdayaan mencakup forum dialog akar rumput (*grassroots dialog forum*), fungsi baru komunikasi pada media partisipatif (*participatory media*), berbagi pengetahuan secara setara (*knowledge-sharing on a co-equal basis*), dan model komunikator pendukung pembangunan (*Development Support Communication*). Dialog akar rumput (*grassroots dialog*) didasarkan atas kaidah partisipasi untuk mempertemukan sumber dan agen perubahan langsung dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyadaran (*conscientization*) melalui dialog dan dialektika. Lebih jauh lagi masyarakat diajak untuk merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya sekaligus pelaksanaan kegiatan dalam upaya pemecahan permasalahan.

Daftar Pustaka

- Baxter, J. 2002. *Competing Discourses in the Classroom: a Post-Structuralist Discourse Analyses of Girl' and Boys' Speech in Public Contexts*. Discourse

*Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
Berwawasan Gender*

- Society 2002, 13; 827. [terhubung berkala] 31 Oktober 2008.
<http://das.sagepub.com/cgi/content/abstract/13/6/827>.
- Birdshall, N. and McGreevey, W.P. 1983. Women, Poverty, and Development. In *Women and Poverty in the Third World*. Ed. M. Buvinic, MA. Lycette, W.P, McGreevey. Pp 3-13. The John Hopkins University, London.
- Butler, J. 1992. *Contingent Foundation: Feminism and the Question of Postmodernism*, in Butler, Judith and Scott, Joan (eds.), *Feminists Theorize the Political*. New York: Routledge.
- Byrne, B. 2000. Troubling Race. Using Judith Butler's Work to think about Racialised Bodies and Selves. [terhubung berkala] 31 Desember 2008. www.ids.ac.uk/UserFiles/File/participation_team/sexrights/byrne.pdf -
- Conanedogawa. 2008. Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori Queer. [terhubung berkala] 30 Oktober 2008. www.indoforum.org/blog.php?b=72&goto=prev - 39k -
- Elizabeth, R. 2007. Pemberdayaan Wanita mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan. Forum Penelitian Agroekonomi. Volume 25 No. 2, Desember 2007: 126 – 135.
- Escobar, A. 1995, *Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton-NJ, University Press, Princeton.
- Foucault, M. 1980. *Herculine Barbine; Being The Recently Discovered* Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite, Sussex: The Harvester Press. [terhubung berkala] 31 Desember 2008. www.amazon.com/Herculine-Barbin-Michel-Foucault/dp/0394508211 - 263k
- Hubeis, A. S. 1995. Posisi dan Peran Wanita dalam Era Globalisasi dalam E. L. Hastuti, 2004. *Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif Jender*. Working Paper No. 50. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Jolly, S. 2000. What use is queer theory to development?. [terhubung berkala] 31 Desember 2008. www.ids.ac.uk/UserFiles/File/participation_team/sexrights/jollytalk.pdf
- Krolokke, C. and Anne Scott Sorensen. 2006. *Gender Communication Theories & Analyses*. SAGE Publications. Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Livia, A. and Kira Hall. 1997. *Its a Girl !. Bringing Performativity Back to Linguistics*. [terhubung berkala] 5 Januari 2009. <http://www.colorado.edu/linguistics/faculty/kira-hall/kira-hall/articles/L&H1997>
- Megawangi. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan, Bandung.
- Melkote, SR. 2001. *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice*. Sage. New Delhi.
- Raggatt, Peter T.F. 2007. *Forms of Positioning in the Dialogical Self: A System of Classification and the Strange Case of Dame*

- Edna Everage. Theory Psychology tahun 2007 (17): 355. [terhubung berkala] 31 Oktober 2008. <http://tap.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/355>.
- Rodriguez, C. 2001. Shattering Butterflies and A mazons: Symbolic Constructions of Women in Colombian Development Discourse. Communication Theory Eleven: Four, November 2001. International Communication Association.
- Salih, S. 2002. On Judith Butler and Performativity. Lovaas – 5001.qdx 7/8/2006: 55. [terhubung berkala] 1 Januari 2009. www.questia.com/library/book/judith-butler-by-
- Servaes, Jan. 2002. Communication for Development: one world, multiple cultures. Second Printing. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey.
- Servaes, Jan. 2007. Harnessing the UN System Into a Common Approach on Communication for Development. International Communication Gazette 2007; 69; 483.
- Van den Ban dan H.S. Hawkins. 2007. Penyuluhan Pertanian. Kanisius, Yogyakarta.